

ABSTRAK

URGENSI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG AKIBAT LEMAHNYA PENGAWASAN KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DI INDONESIA

Ratu Wida Widyaningsih Suhandi (2310622023), Bambang Waluyo, Slamet Tri

Wahyudi

Perdagangan Orang sudah sering terjadi di Indonesia dan tercatat dalam sejarah terjadinya perdagangan orang disuatu Negara yang memiliki kedaulatan tentu diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan, modus yang dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah beragam dan mengakibatkan civitas akademisi menjadi korban perdagangan orang. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa yang menjadi korban dan bagaimana pengaturan hukum seharusnya dalam kebijakan kampus merdeka di indonesia pada program magang merdeka belajar kampus merdeka. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif pendekatan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yuridis empiris menggunakan pendekatan penelitian dengan cara wawancara dengan pihak berkompeten. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa dunia Pendidikan menjadi incaran pelaku kejahatan dengan modus mengirimkan mahasiswa magang ke luar negeri yang mana secara tidak langsung hal tersebut mempertegas adanya kelemahan dalam pengawasan kebijakan kampus merdeka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelamahan dalam pengawasan kebijakan kampus merdeka menyebabkan timbulnya implikasi serius. Sehingga saran dalam penelitian ini pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa dan pengaturan hukum seharusnya perlu disusun secara komprehensif agar dapat memberikan perlindungan hukum yang luas dan unsur-unsur yang termuat dalam sistem hukum wajib di implementasikan tanpa memberikan celah kekosongan hukum. Semua harus diperhatikan mulai dari pengaturan hukum, bentuk pengawasan dan bentuk perlindungannya dengan tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sukses dilakukan.

Kata Kunci: Pemberantasan tindak pidana; perdagangan orang; kebijakan kampus Merdeka.

ABSTRACT

THE URGENCY OF TACKLING HUMAN TRAFFICKING CRIMES DUE TO WEAK SUPERVISION OF KAMPUS MERDEKA POLICIES IN INDONESIA

Ratu Wida Widyaningsih Suhandi (2310622023), Bambang Waluyo, Slamet Tri Wahyudi

Human trafficking has often occurred in Indonesia and recorded in the history of trafficking in a country that has sovereignty is certainly caused by the weak supervision of the relevant parties who have the authority, the mode carried out by the perpetrators of human trafficking has varied and resulted in the academic community becoming victims of human trafficking. The problems studied in this study are how efforts to eradicate the criminal act of trafficking in persons against students who are victims and how the legal arrangements should be in the independent campus policy in Indonesia in the independent internship programme to learn an independent campus. This research was conducted using normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical method of research approach uses legislation. Meanwhile, empirical juridical uses a research approach by interviewing competent parties. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data which are then analysed qualitatively. The results obtained from this study are that the world of education is the target of criminals with the mode of sending student internships abroad which indirectly confirms the weaknesses in the supervision of independent campus policies. This study concludes that the weaknesses in the supervision of the independent campus policy have caused serious implications.

Keywords: Eradication of criminal offences; trafficking in persons; independent campus policy.